

Penelitian *E-Government* di Propinsi Jawa Barat: Kajian Pustaka Sistematis

Umar Yunan Kurnia Septo Hedyanto*

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom
 Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung 40257, Indonesia

Article Info

Article history:

Received
 8 September 2018

Accepted
 26 January 2019

Keywords:

E-government
 West Java
 Systematic literature
 review

Abstract

Assessment of the implementation e-government in West Java Province has decreased, despite not having an impact on increasing the development of e-government in Indonesia compared with other countries in the world that experienced a rating increase to 107th position in 2018. Seeing the development of e-government in West Java Province makes a necessity to improve its quality so that it can have an impact on increasing Indonesia's ranking in the top position in the future. For this reason, a state of the art mapping of e-government research is needed in West Java Province based on the results of a systematic literature review. By focusing on five main steps, namely identification of research, selection of primary studies, assessment of study quality, data extraction and monitoring, and data synthesis. In addition to the five main steps, this research will look at three aspects in the design of e-government, namely aspects of technology, people and processes. The sources used in this study are journals and proceedings of seminars taken from the Google Scholar database for five years from 2014 to 2018. The key words used in searching the Google Scholar database are "e-government", "West Java ", and " Jawa Barat ". These keywords are searched in the entire article, not just in the article title. The mapping results show that research issues related to the analysis of e-government implementation are more dominant than research issues related to the design of e-government systems. Nevertheless, in the research issue related to the analysis of e-government implementation there are still opportunities to explore the interaction of G2B and G2G. Research issues related to the design of e-government systems are dominated by the design of technological aspects, so that research opportunities are still open in the design of human aspects and processes.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan *e-government* di Indonesia mengalami peningkatan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, dengan hasil peringkat 116 pada tahun 2016 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016) yang kemudian mengalami peningkatan pada 2018 menjadi peringkat 107 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018). Kenaikan ini juga menyebabkan perpindahan Indonesia dari negara-negara dalam *Middle E-Government Development Index* (EGDI) menjadi termasuk negara-negara yang mempunyai *High* EDGI. Kesuksesan ini merupakan hasil perjuangan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerapan *e-government* di setiap daerah di Indonesia.

Dalam skala nasional dilakukan Peningkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat e-Government, Ditjen. APTIKA – KEMKOMINFO RI, 2018). Berdasarkan hasil PeGI Tingkat Provinsi, teridentifikasi bahwa pada awal penilaian di tahun 2012 Provinsi Jawa barat menduduki posisi pertama sedang pada tahun 2015 turun menjadi posisi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Selama 4 tahun penilaian PeGI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, penilaian Provinsi Jawa Barat menurun pada tahun 2014 dan mulai membaik di tahun 2015. Pada tahun 2015, Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai rata-rata 3,07. Nilai tersebut masih memiliki selisih cukup jauh dengan nilai rata-rata Provinsi DKI Jakarta yaitu 3,39. Dapat dilihat dari hasil pada skala internasional dan nasional tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas implemementasi *e-government* khususnya di Provinsi Jawa Barat.

*Corresponding author. Umar Yunan Kurnia Septo Hedyanto
 Email address: umaryunan@telkomuniversity.ac.id

Penelitian untuk meningkatkan kualitas implementasi *e-government* di Provinsi Jawa Barat sudah mulai dilakukan, baik yang berkaitan dengan perancangan *e-government*, maupun analisis implementasi *e-government*. Contoh penelitian yang berkaitan dengan perancangan *e-government* dilakukan oleh Ramdhani, et al. (2018) dan Riza, et al. (2018) yang membahas mengenai *data center* di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bandung. Sementara itu, contoh penelitian yang berkaitan dengan analisis implementasi *e-government* dilakukan oleh Putra, et al. (2018) yang menganalisis keefektifan 29 *website* pariwisata di Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berbagai penelitian yang dilakukan diharapkan dapat saling melengkapi sehingga memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas implementasi *e-government* di Provinsi Jawa Barat.

Arah penelitian yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi *e-government* di Provinsi Jawa Barat perlu diidentifikasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memetakan *state of the art* penelitian *e-government* di Provinsi Jawa Barat dan mengidentifikasi peluang penelitian lanjutan. Pemetaan *state of the art* dirumuskan berdasarkan isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government* dan perancangan sistem *e-government*.

2. METODOLOGI

2.1 Tinjauan Pustaka

Definisi dan Ruang Lingkup *E-Government*

E-government merupakan suatu proses layanan publik dari instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan utilisasi teknologi informasi dan komunikasi ini, manajemen pemerintahan dapat menjadi lebih efisien, dan memicu perubahan sosial di masyarakat (Ali, et al., 2018). Implementasi *e-government* memperluas jangkauan layanan pemerintah karena tidak lagi dibatasi lokasi fisik dari instansi pemberi layanan.

Istilah *e-government* atau *electronic government* berkaitan dengan istilah *e-commerce* yang telah dikenal lebih dahulu. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik yang memberikan informasi dan layanan dari pemerintah. Interaksi yang terjadi dalam *e-commerce* adalah *business to business* (B2B) atau *business to customer* (B2C). Sementara itu, interaksi yang terjadi dalam *e-government* adalah *government to citizens* (G2C), *government to business* (G2B), dan *government to government* (G2G) (Bhatnagar, 2004). Dengan demikian, dalam perancangan sistem *e-government*, perlu diperhatikan jenis interaksi yang akan

tercakup dalam sistem. Interaksi yang tercakup akan menentukan jenis pengguna sistem yaitu antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Karakter dan kebutuhan dari setiap jenis pengguna ini yang harus dipertimbangkan dalam perancangan sistem.

Sistem *e-government*, seperti sistem *e-commerce*, memiliki tahap-tahap perkembangan. Tahap perkembangan *e-commerce* terdiri atas tahap *pure publishing*, *interactivity*, *completing transactions*, dan *delivery*. Sementara itu, tahap perkembangan *e-government* terdiri atas *web presence*, *limited interactions*, *transactions*, dan *transformation*. Pada tahap *web presence* dilakukan penyebaran informasi melalui media *website* sehingga pengguna dapat mengetahui berbagai prosedur layanan pemerintah. Pada tahap *limited interactions* terjadi interaksi secara *online*, misalnya pengguna dapat *men-download* aplikasi untuk layanan tertentu. Pada tahap *transactions* terjadi transaksi melalui penyampaian dokumen secara elektronik. Pada tahap *transformation* terjadi penyampaian layanan secara elektronik yang melibatkan lebih dari satu departemen (Bhatnagar, 2004). Oleh karena itu, dalam perancangan sistem *e-government* perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan agar sistem tersebut dapat beroperasi sampai tahap *transformation*, tidak berhenti di tahap *web presence* saja.

Dampak *E-Government*

E-government membuat manajemen pemerintahan menjadi lebih efisien (Ali, et al., 2018). Dampak positif ini diperoleh karena *e-government* dapat meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi administratif, meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan, memberdayakan masyarakat pedesaan, meningkatkan kinerja karyawan di instansi-instansi pemerintah, serta menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan keuntungan (Bhatnagar, 2004; Ali, et al., 2018).

Aspek-Aspek dalam Perancangan *E-Government*

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan dari pemerintah, sehingga teknologi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perancangan *e-government*. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan pengalaman dari proyek-proyek perancangan dan implementasi *e-government* yang sukses, faktor teknologi hanya berperan sebesar 20%, dan terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan penting yaitu rekayasa ulang proses bisnis (30%), manajemen perubahan (40%), dan pengelolaan partner (10%). Secara umum, terdapat interaksi antara tiga aspek yang perlu diperhatikan secara seimbang dalam perancangan *e-government* yaitu aspek teknologi, manusia, dan proses

(Bhatnagar, 2004). Aspek teknologi berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, yang dimanfaatkan dalam sistem *e-government*. Aspek manusia berkaitan dengan kompetensi karyawan instansi pemerintah yang akan mengoperasikan dan berinteraksi dengan sistem *e-government*. Aspek proses berkaitan dengan proses bisnis yang melibatkan interaksi melalui sistem *e-government*.

2.2 Langkah-langkah Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan *state of the art* penelitian *e-government* di Provinsi Jawa Barat. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian pustaka sistematis. Langkah-langkah kajian pustaka sistematis dalam penelitian ini mengacu pada protokol kajian pustaka sistematis yang dikembangkan oleh Kitchenham dan Charters (2007). Protokol tersebut terdiri atas lima langkah utama, yaitu identifikasi penelitian, pemilihan studi primer, penilaian kualitas studi, ekstraksi dan pemantauan data, serta sintesis data. Kelima langkah utama tersebut ditampilkan dalam Gambar 1.

2.2.1 Identifikasi Penelitian

Pada langkah pertama yaitu identifikasi penelitian, ditetapkan sumber untuk mendapatkan literatur potensial yang akan dikaji. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan prosiding seminar yang diambil dari basis data Google Scholar. Pemilihan basis data Google Scholar mengikuti Rizana, et al., (2018) yang menjelaskan bahwa basis data Google Scholar mengindeks lebih banyak artikel berbahasa Indonesia, dibandingkan basis data lainnya. Artikel berbahasa Indonesia merupakan literatur potensial yang mungkin dominan dalam kajian ini mengingat lokasi kajian secara spesifik berada di Indonesia. Kata-kata kunci yang digunakan dalam pencarian di basis data Google Scholar adalah "*e-government*", "West Java", dan "Jawa Barat". Kata-kata kunci tersebut dicari dalam seluruh artikel, bukan hanya pada judul artikel. Pencarian dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2014 sampai tahun 2018.

2.2.2 Pemilihan Studi Primer

Pada langkah kedua yaitu pemilihan studi primer, artikel publikasi yang diperoleh melalui langkah pertama kemudian dikaji berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam artikel serta konten artikel. Berdasarkan kriteria bahasa, artikel primer yang dipilih adalah yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berkaitan dengan kriteria konten, artikel primer yang dipilih adalah artikel yang membahas *e-government* dengan lingkup kajian di wilayah

desa, kotamadya atau kabupaten atau kota administratif, serta provinsi di Jawa Barat.

2.2.3 Penilaian Kualitas Studi

Pada langkah ketiga, kualitas artikel yang diperoleh melalui langkah kedua ditinjau. Kualitas artikel dinilai berdasarkan kelengkapan struktur artikel, metodologi, serta referensi yang digunakan. Berdasarkan struktur artikel, hal-hal yang diperhatikan adalah kelengkapan artikel yang setidaknya memiliki penjelasan mengenai pendahuluan, metodologi, hasil, dan referensi. Berdasarkan metodologi, hal-hal yang diperhatikan adalah kejelasan langkah-langkah penelitian. Berdasarkan referensi yang digunakan, hal-hal yang diperhatikan adalah kebaruan referensi yang digunakan, serta keterkaitan antara referensi yang digunakan dengan topik pada artikel.

2.2.4 Ekstraksi dan Pemantauan Data

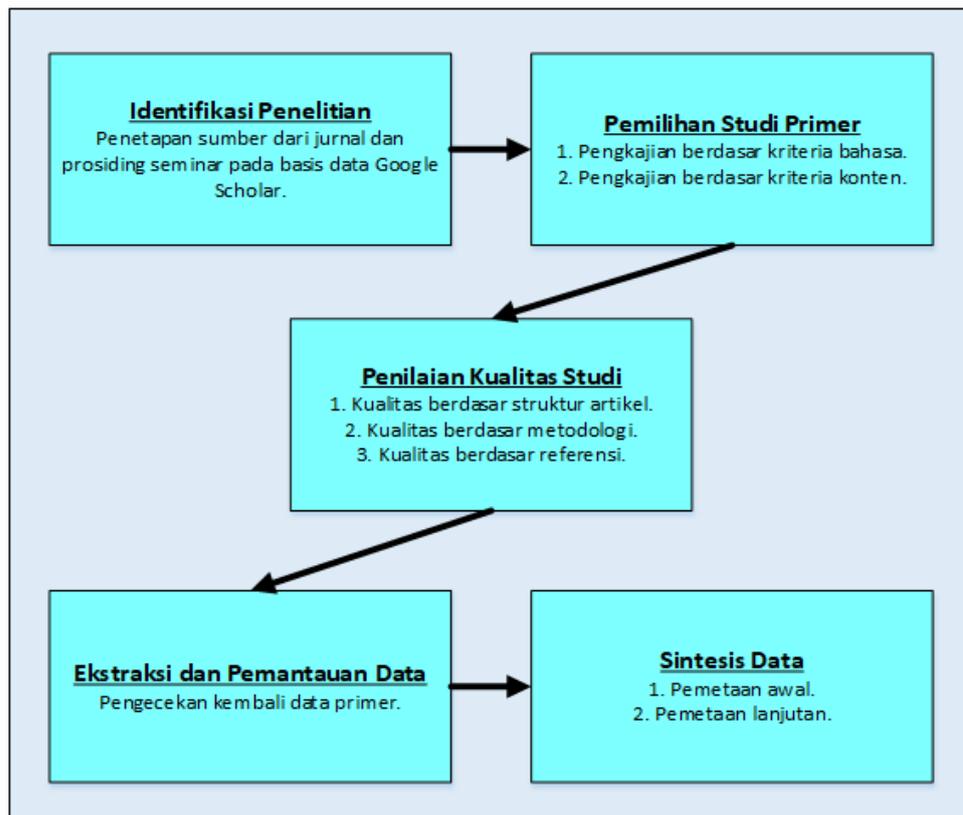
Pada langkah keempat, ditentukan artikel primer yang akan digunakan. Artikel primer yang digunakan adalah seluruh artikel yang dipilih pada langkah ketiga dan memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan pada langkah ketiga. Umumnya, artikel-artikel yang telah terindeks pada basis data artikel ilmiah seperti Google Scholar telah memenuhi syarat kualitas artikel ilmiah.

2.2.5 Sintesis Data

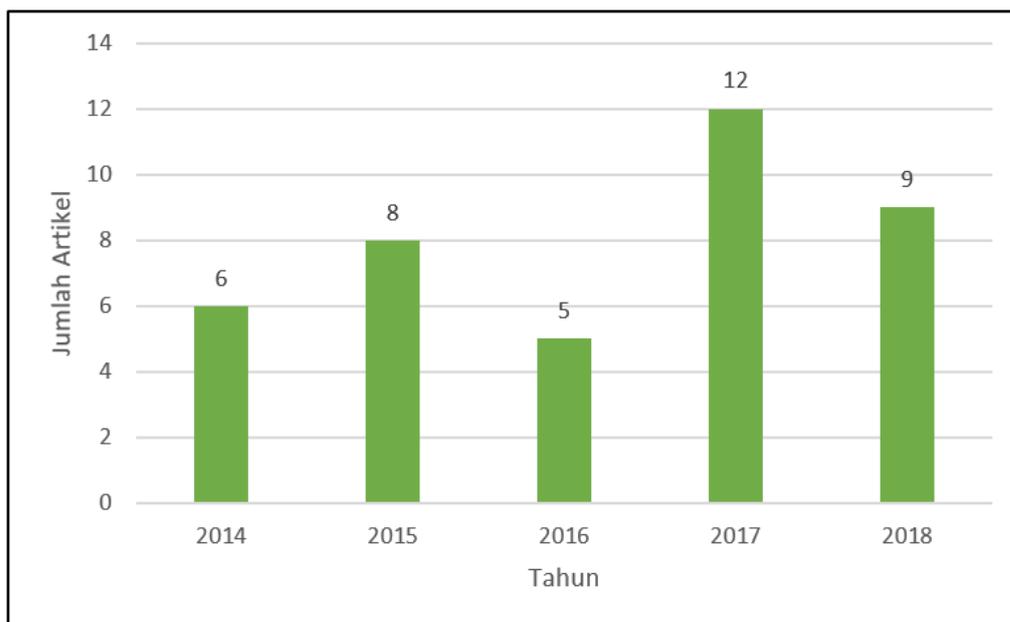
Pada langkah kelima, artikel primer dipetakan untuk menunjukkan *state of the art* penelitian *e-government* di Provinsi Jawa Barat. Pemetaan awal dilakukan berdasarkan sebaran tahun penerbitan, jenis unit analisis, dan bahasan utama. Pemetaan lanjutan dilakukan untuk mendetailkan isu-isu dalam bahasan utama.

3. HASIL

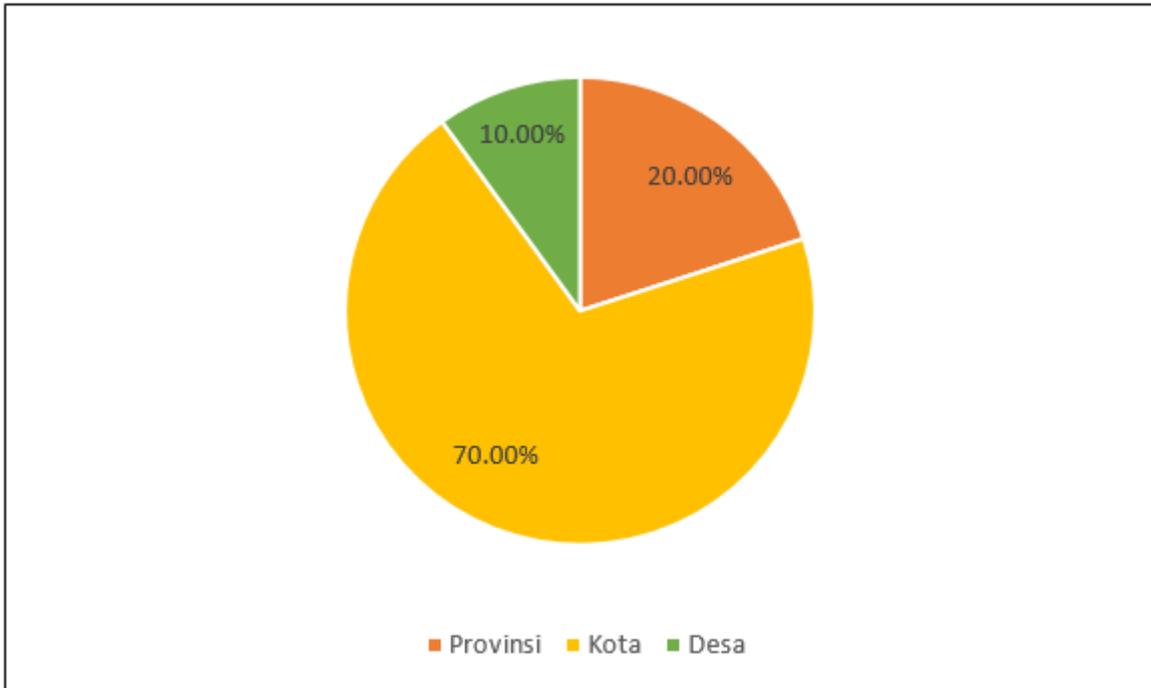
Artikel primer diperoleh dari basis data Google Scholar dengan kata kunci "*e-government*", "West Java", dan "Jawa Barat". Artikel primer dibatasi pada artikel yang dipublikasikan antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Pencarian pada basis data Google Scholar tersebut memunculkan sejumlah 439 artikel. Seluruh artikel tersebut kemudian ditinjau kesesuaiannya dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan adalah artikel berupa jurnal dan prosiding seminar yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris serta membahas *e-government* dengan lingkup kajian di wilayah desa, kotamadya atau kabupaten atau kota administratif, serta provinsi di Jawa Barat. Berdasarkan hasil peninjauan, dari 439 artikel tersebut, teridentifikasi 40 artikel yang memenuhi kriteria. Seluruh 40 artikel tersebut memiliki kualitas yang baik sebagai publikasi karya ilmiah, sehingga dapat digunakan sebagai artikel primer.



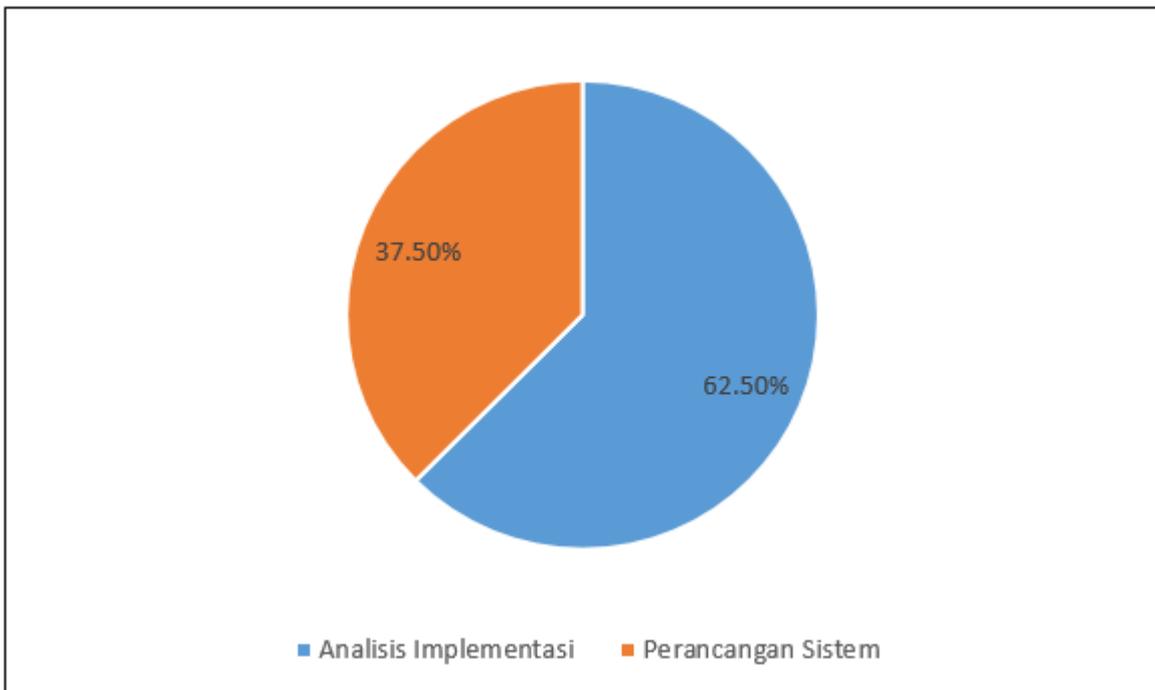
Gambar 1.
Langkah-langkah kajian pustaka sistematis



Gambar 2.
Distribusi jumlah artikel primer per tahun



Gambar 3.
Distribusi jenis unit analisis



Gambar 4.
Distribusi bahasan utama dalam artikel primer

Artikel-artikel primer tersebut diterbitkan antara tahun 2014 sampai tahun 2018. Distribusi jumlah artikel per tahun dapat dilihat pada Gambar 2. Jumlah artikel yang diterbitkan pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 secara berurutan adalah 6, 8, 5, 12, dan 9. Artikel terbanyak adalah artikel yang diterbitkan pada tahun 2017. Untuk tahun 2018, jumlah artikelnya lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 karena pencarian melalui basis data Google Scholar dilakukan pada bulan September 2018. Dengan demikian, masih ada peluang terdapat artikel-artikel yang akan terbit antara bulan September hingga Desember 2018.

Artikel-artikel primer yang teridentifikasi membahas *e-government* di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan unit analisisnya, selain tingkat provinsi, terdapat pula artikel yang menggunakan unit analisis kota atau desa yang berada dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Distribusi jenis unit analisis yang digunakan dalam artikel primer disajikan dalam Gambar 3. Jumlah artikel yang menggunakan unit analisis tingkat provinsi adalah 8 artikel (20%). Jumlah artikel yang menggunakan unit analisis kotamadya/kabupaten/kota administratif adalah 28 artikel (70%). Jumlah artikel yang menggunakan unit analisis desa adalah 4 artikel (10%). Dalam artikel primer tidak terdapat artikel yang menggunakan tingkat kecamatan sebagai unit analisis.

Secara umum, terdapat dua bahasan utama dalam artikel-artikel primer, yaitu analisis implementasi *e-government* dan perancangan sistem *e-government*. Terdapat 25 artikel (62,5%) yang membahas mengenai analisis implementasi *e-government* dan 15 artikel (37,5%) yang membahas mengenai perancangan sistem *e-government*. Ilustrasi dari tersebut ditampilkan pada Gambar 4.

Distribusi bahasan utama dalam artikel primer menjadi dasar dalam pemetaan *state of the art* penelitian *e-government* di Provinsi Jawa Barat. Isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government* dan isu penelitian terkait perancangan sistem *e-government* dipetakan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

4. PEMBAHASAN

4.1 Isu Penelitian terkait Analisis Implementasi *E- Government*

Isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government* dibahas dalam 25 artikel primer. Artikel-artikel tersebut dipetakan lebih lanjut dikaitkan dengan jenis interaksi yang dibahas, yaitu *government to citizens* (G2C), *government to business* (G2B), dan *government to government* (G2G). Terdapat tiga artikel yang sekaligus

membahas G2C, G2B, dan G2G yaitu Praditya (2014), Napitupulu (2015), dan Idrus, et al. (2017). Praditya (2014) membahas tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk *e-government* di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Napitupulu (2015) dan Idrus, et al. (2017) menggunakan lokasi kajian yang sama, yaitu Pemerintah Kotamadya Bogor. Napitupulu (2015) mengidentifikasi 50 faktor sukses dalam implementasi *e-government*, sedangkan Idrus, et al. (2017) menganalisis kesuksesan implementasi *e-government*. Selain ketiga artikel primer tersebut, terdapat 22 artikel lainnya yang hanya membahas salah satu jenis interaksi, yaitu 13 artikel yang khusus membahas G2C, 3 artikel yang khusus membahas G2B, dan 6 artikel yang khusus membahas G2G. Ringkasan mengenai 25 artikel primer yang membahas isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government* ditampilkan dalam Tabel 1.

4.2 Isu Penelitian terkait Perancangan Sistem *E- Government*

Isu penelitian terkait perancangan sistem *e-government* dibahas dalam 15 artikel primer. Artikel-artikel tersebut dipetakan lebih lanjut berdasarkan aspek teknologi, manusia, dan proses. Berdasarkan pemetaan, teridentifikasi bahwa tidak terdapat artikel yang secara khusus merancang aspek manusia dalam sistem *e-government*. Topik yang mendominasi adalah aspek teknologi yang dibahas dalam 12 artikel, sedangkan aspek proses hanya dibahas dalam 3 artikel. Aspek teknologi yang dibahas dalam artikel primer sudah melingkupi perancangan perangkat keras maupun perangkat lunak. Contoh artikel yang membahas perancangan perangkat keras adalah Riza, et al. (2018). Perancangan sistem perangkat lunak yang dibahas dalam artikel primer meliputi berbagai aplikasi *e-government* mulai dari sistem informasi geografis (Marlintha, et al., 2017), hingga aplikasi *mobile* (Renaldi & Djamal, 2017). Perancangan sistem dalam aspek proses membahas perancangan proses penyebaran informasi untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Hadiana & Hirawan, 2016), perancangan manajemen informasi dan rekaman berbasis standar ISO 30301: 2011 (Mubarok & Albarda, 2017), dan perumusan *key performance indicator* untuk model *dashboard* layanan pengadaan barang (Hermansyah & Herliani, 2018). Ringkasan mengenai 15 artikel primer yang membahas isu penelitian terkait perancangan *e-government* disampaikan dalam Tabel 2.

Tabel 1.
Isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government*

Penulis	Analisis Implementasi <i>E-Government</i>			Fokus Kajian
	G2C	G2B	G2G	
Budhirianto (2014)			√	analisis implementasi <i>e-government</i> di Pemerintah Daerah Kotamadya Sukabumi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, kebijakan pengembangan, dan sumber daya aparatur pemerintah sebagai media informasi dan komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Praditya (2014)	√	√	√	analisis tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk <i>e-government</i> di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
Yalia (2014)	√			analisis implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Kepariwisata Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi
Yuliasari (2014)			√	analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SiAP LKPD) dan implikasinya terhadap manfaat bagi auditor dengan studi kasus di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat
Yuliasari et al. (2014)			√	analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SiAP LKPD) dan implikasinya terhadap kinerja auditor dengan studi kasus di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat
Budhirianto (2015)	√			penilaian kualitas <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kotamadya Bandung, Kota Cimahi dan Kotamadya Bekasi
Napitupulu (2015)	√	√	√	identifikasi 50 faktor sukses implementasi <i>e-government</i> di Pemerintah Kotamadya Bogor
Nurfalah dan Wihayati (2015)	√			analisis peranan website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dalam mempromosikan wisata di Cirebon
Nurseptian et al. (2015)	√			analisis fungsi dan fitur pada <i>website</i> resmi pariwisata Pemerintah Kotamadya Bandung
Purnawingwulan, et al. (2015)	√			analisis dan peluang pengembangan kebijakan E-Desa di Desa Cibeureum di Kabupaten Bandung
Setiawati dan Pratiwi (2015)	√			analisis faktor adopsi <i>e-government</i> dari sisi pengguna di Kotamadya Bandung
Suherman et al. (2015)	√			analisis pengaruh penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kotamadya Tasikmalaya
Yusup et al. (2015)		√		analisis adopsi <i>e-billing</i> oleh industri tekstil untuk pembayaran pajak di Kotamadya Bandung
Adelia et al. (2016)	√			pengaruh kualitas pelayanan <i>e-government</i> terhadap kepuasan pengguna di Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
Hertiarani (2016)	√			analisis implementasi <i>e-samsat</i> di Provinsi Jawa Barat
Budhirianto (2017)			√	analisis implementasi <i>e-government</i> di Pemerintah Kotamadya Sukabumi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, kebijakan pengembangan, dan sumber daya aparatur pemerintah
Erdinaya et al. (2017)	√			analisis komunikasi antara pemerintah provinsi jawa barat dan masyarakat melalui <i>website</i> dan sosial media
Idrus et al. (2017)	√	√	√	analisis implementasi <i>e-government</i> di Pemerintah Kotamadya Bogor
Puspita dan Ritchi (2017)			√	analisis kesuksesan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Cimahi
Wicaksono et al. (2017)		√		analisis pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> terhadap pencegahan penipuan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik dan Unit Layanan Pengadaan di 6 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
Atthahara (2018)	√			analisis kualitas aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta
Irawati dan Munajat (2018)			√	penilaian implementasi <i>e-government</i> pada fase <i>pre-implementation</i> , <i>implementation</i> , dan <i>post-implementation</i> di Pemerintah Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut
Naufaldhia dan Octavia (2018)	√			analisis kualitas layanan pada <i>website</i> Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kotamadya Bandung
Putra et al. (2018)	√			analisis keefektifan 29 <i>website</i> pariwisata di Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
Septiawan (2018)		√		analisis implementasi <i>e-procurement</i> di Unit Layanan Pengadaan di 28 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.
Isu penelitian terkait perancangan sistem *e-government*

Penulis	Perancangan Sistem <i>E-Government</i>			Fokus Kajian
	Teknologi	Manusia	Proses	
Fajar et al. (2014)	√			identifikasi kebutuhan untuk aplikasi <i>e-government</i> di Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi
Hadiana dan Hirawan (2016)	√			perumusan rencana strategis sistem informasi Pemerintah Kabupaten Subang
Sulaiman, et al. (2016)			√	perancangan proses dan media informasi untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pemerintah Kotamadya Banjar
Syahidin (2016)	√			perancangan arsitektur sistem informasi perencanaan dan penganggaran barang milik daerah di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Renaldi dan Djamal (2017)	√			perancangan aplikasi mobile untuk komunitas lokal di satu rukun warga di Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung
Marhaeni dan Pandini (2017)	√			perancangan aplikasi surat-menyurat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bogor
Marlintha, et al. (2017)	√			perancangan sistem informasi geografis untuk mendukung <i>smart village</i> di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Mubarak dan Albarda (2017)			√	perancangan manajemen informasi dan rekaman berbasis standar ISO 30301: 2011 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Suhardi et al. (2017)	√			perancangan sistem komplain publik di Pemerintah Kota Cimahi
Wibawa dan Zulfikar (2017)	√			perancangan sistem informasi geografis potensi daerah untuk Pemerintah Kabupaten Bandung
Yufrizal et al. (2017)	√			perancangan Sistem Informasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 (Puskesmas) terintegrasi Kota Cimahi
Alamanda et al. (2018)	√			implementasi teknologi M2M untuk Bandung Smart City
Hermansyah dan Herliani (2018)			√	perumusan <i>key performance indicator</i> untuk model <i>dashboard</i> layanan pengadaan barang di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Ramdhani et al. (2018)	√			perancangan <i>site selection</i> untuk <i>data center</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bandung
Riza et al. (2018)	√			<i>space planning</i> untuk <i>data center</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bandung

4.3 Peluang Penelitian Selanjutnya

Pemetaan *state of the art* penelitian *e-government* di Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya dominasi dari isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government*. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk lebih menggali interaksi G2B dan G2G. Sementara itu, isu penelitian terkait perancangan sistem *e-government* didominasi oleh perancangan aspek teknologi, sehingga masih terbuka peluang penelitian dalam perancangan aspek manusia dan proses. Penelitian-penelitian lanjutan terkait *e-government* di Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan agar implementasi *e-government* tidak hanya sampai tahap *web presence* namun dapat meningkat hingga mencapai tahap *transformation*).

5. KESIMPULAN

Pemetaan *state of the art* penelitian *e-government* di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government* lebih mendominasi dibandingkan isu penelitian terkait perancangan sistem *e-government*. Meskipun demikian, dalam isu penelitian terkait analisis implementasi *e-government* masih terdapat peluang untuk lebih menggali interaksi G2B dan G2G. Isu penelitian terkait perancangan sistem *e-government* didominasi oleh perancangan aspek teknologi, sehingga masih terbuka peluang penelitian dalam perancangan aspek manusia dan proses.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Adelia, T., Wulan, R. R. & Nurfebriyaning, S., 2016. *Pengaruh kualitas pelayanan e-government Kantor Imigrasi Kelas II Karawang terhadap kepuasan pengguna jasa*

- keimigrasian melalui internet*. Bandung, Universitas Telkom, pp. 2517-2526.
2. Alamanda, D. T. et al., 2018. The roles of M2M technology on the realisation of Bandung Smart City. *International Journal of Business and Globalisation*, 21(1): 46-73.
 3. Ali, M. A., Hoque, M. R. & Alam, K., 2018. An empirical investigation of the relationship between e-government development and the digital economy: the case of Asian countries. *Journal of Knowledge Management*, 22(5): 1176-1200.
 4. Atthahara, H., 2018. Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1): 66-77.
 5. Bhatnagar, S., 2004. *E-Government from Vision to Implementation: A Practical Guide with Case Studies*. 1st ed. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.
 6. Budhirianto, S., 2014. Pengembangan Jabar Cyber Province sebagai media informasi dan komunikasi. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(1): 55-68.
 7. Budhirianto, S., 2015. Apresiasi masyarakat terhadap media website pada era keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 16(1): 35-48.
 8. Budhirianto, S., 2017. Pengembangan Kota Sukabumi dalam mewujudkan 'Sukabumi Cyber-City'. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2): 109-111.
 9. Direktorat e-Government, Ditjen. APTIKA – KEMKOMINFO RI, 2018. *Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)*. [Online] Available at: <http://pegi.layanan.go.id> [diakses tanggal 1 September 2018].
 10. Erdinaya, L. K., Subekti, P. & Oktaviani, P., 2017. *The process of transaction activity between citizen and government through e-Government in West Java provincial government*. Surakarta, KnE Social Sciences, p. 216–219.
 11. Fajar, A. N., Budiardjo, E. K. & Hasibuan, Z. A., 2014. *The R2FM method for requirement analysis in software product line for e-government applications*. Rome, Institute of Research Engineers and Doctors, pp. 102-106.
 12. Hadiana, A. & Hirawan, D., 2016. Pemanfaatan COBIT 4.1 dalam perencanaan strategis sistem informasi RPJM daerah. *Infotech Journal*, 2(1): 15-19.
 13. Hermansyah, R. & Herliani, S., 2018. *Penetapan key performance indicator untuk model dashboard monitoring layanan pengadaan barang Diskominfo Jawa Barat*. Pangkalpinang, STMIK Atma Luhur, pp. 1370-1375.
 14. Hertiarani, W., 2016. Implementasi kebijakan e-Samsat di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(3): 419-440.
 15. Idrus, I. A., Zakiyah, U. & Hadiyah, L., 2017. Kajian sukses implementasi e-government studi kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), pp. 120-134.
 16. Irawati, I. & Munajat, E., 2018. Electronic government assessment in West Java Province, Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(2), pp. 365-381.
 17. Kitchenham, B. & Charters, S., 2007. *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Staffordshire: Keele University.
 18. Marhaeni & Pandini, I., 2017. Rancang bangun aplikasi surat-menyurat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 6(2): 45-54.
 19. Marlintha, A. B., Irawan, B. & Latuconsina, R., 2017. *Design and implementation of smart village mapping geographic information system based web in the Cinunuk village*. Bandung, IEEE, pp. 66-71.
 20. Mubarok, C. H. & Albarda, 2017. *Design information and records management framework for government organization based on ISO 30301: 2011: Case study at PPID general election commissions West Java*. Tangerang, IEEE, pp. 1-6.
 21. Napitupulu, D., 2015. Kajian faktor sukses implementasi e-government studi kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(3): 229-236.
 22. Naufaldhia, M. & Octavia, D., 2018. *Analisa kualitas layanan elektronik pemerintah (electronic government Serv. Qual) pada website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung*. Bandung, Universitas Telkom, pp. 1-10.
 23. Nurfalah, F. & Wihayati, W., 2015. Peranan media promosi melalui website yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dalam menumbuhkan minat berwisata di Cirebon. *Jurnal Signal*, 3(2): 1-14.
 24. Nurseptian, A., Riyana, C. & Rahmafitria, F., 2015. Analisis fungsi dan fitur pada website resmi pariwisata Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Resort & Leisure*, 12(1): 57-72.
 25. Praditya, D., 2014. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat pemerintahan desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2): 129-140.
 26. Purnawingwulan, M. M., Kurniasih, D. & Afrianto, I., 2015. Pengembangan model kebijakan pembangunan e-desa di Kabupaten

- Bandung (kualifikasi pendidikan teknologi perangkat desa). *Edutech*, 1(2), pp. 167-183.
27. Puspita, P. S. & Ritchi, H., 2017. *Deduksi model kesuksesan sistem informasi Delone and Mclean pada implementasi di lingkungan pemerintah daerah*. Bandung, Universitas Widyatama, pp. 148-157.
 28. Putra, F. K. K., Saepudin, P., Adriansyah, E. & Adrian, I. G. A. W., 2018. Digital tourism: a content analysis of West Java tourism websites. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(1): 73-84.
 29. Ramdhani, A., Kurniawan, M. T. & Hediyanto, U. Y. K. S., 2018. *Analisis dan perancangan fasilitas data center berdasarkan site selection standar ANSI/BICSI 002 dengan metode PPDIOO studi kasus: Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bandung*. Bandung, Universitas Telkom, pp. 3113-3120.
 30. Renaldi, F. & Djamal, E. C., 2017. *Developing citizen centric integrated systems for local community: an approach towards M-Government application*. Tangerang, IEEE, 1-4.
 31. Riza, M. I. A., Kurniawan, M. T. & Hediyanto, U. Y., 2018. *Analisis dan perancangan space planning pada data center di Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan standar ANSI/BICSI 002 dengan metode PPDIOO studi kasus: Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bandung*. Bandung, Universitas Telkom, pp. 3148-3155.
 32. Rizana, A. F. et al., 2018. *Value chain analysis for determining innovation priority in batik small medium industry*. Bandung, IEOM Society International, pp. 1735-1745.
 33. Septiawan, B., 2018. Keberhasilan implementasi sistem e-procurement pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1): 23-40.
 34. Setiawati, C. I. & Pratiwi, P. M., 2015. *Conceptual model of citizen's intention associated to e-government and internet behavior: why do Bandung citizens follow the mayor's social media?*. Bandung, IEEE: 336-341.
 35. Suhardi, et al., 2017. *Public complaint service engineering based on good governance principles*. Langkawi, IEEE, pp. 1-6.
 36. Suherman, M., Almunawwaroh, M. & Marliana, R., 2015. Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1): 49-64.
 37. Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D. & Purnaningsih, N., 2016. Merancang media informasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. *Kawistara*, 6(1): 93-106.
 38. Syahidin, Y., 2016. *Arsitektur sistem informasi Government To Government (G2G) perencanaan dan penganggaran barang milik daerah dengan metode unified software development process*. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2(1): 75-88.
 39. United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016. *United Nations E-Government Survey 2016 E-Government In Support Of Sustainable Development*, New York: United Nations.
 40. United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018. *United Nations E-Government Survey 2018 Gearing E-Government To Support Transformation Towards Sustainable And Resilient Societies*, New York: United Nations.
 41. Wibawa, J. C. & Zulfikar, R., 2017. Analisis dan pemetaan potensi daerah berbasis GIS menggunakan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 3(3): 524-538.
 42. Wicaksono, A. P., Urumsah, D. & Asmui, F., 2017. The implementation of e-procurement system: Indonesia evidence. *SHS Web of Conferences*, 34: 1-9.
 43. Yalia, M., 2014. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemanfaatan TIK bagi pengembangan kepariwisataan daerah. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 18(3): 255-264.
 44. Yufrizal, M. R. N., Renaldi, F. & Umbara, F. R., 2017. *Sistem informasi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 1 (Puskesmas) terintegrasi Kota Cimahi*. Bandung, Universitas Komputer Indonesia, pp. 163-168.
 45. Yuliasari, E., 2014. Analisis faktor determinan penggunaan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan dan implikasinya. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 3(2): 83-89.
 46. Yuliasari, E., Winarno, W. W. & Hantono, B. S., 2014. *Analisis faktor determinan penggunaan sistem pendukung e-government dan implikasinya terhadap kinerja pengguna*. Yogyakarta, STMIK AMIKOM Yogyakarta, pp. 3.03-43-3.03-48.
 47. Yusup, M., Hardiyana, A. & Sidharta, I., 2015. User acceptance model on e-billing adoption: a study of tax payment by government agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4): 150-157.